PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH
"Meningkatkan Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Implementasi Ekonomi Sirkuler untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"
Volume 11 No. 2 – Juni 2026

ANALISIS KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN KARANG INTANG

Luthfi Fatah[a], Antung Cahaya Hildasari[b] , Soraya Noormalasari[c] , Ridayati[d]

[a-d]Fakultas Pertanian ULM Prodi Agribisnis

Email korespondensi: luthfi@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan pertanian di Kecamatan Karang Intan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas petani dan mempercepat transfer teknologi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian 2. Untuk mengetahui permasalahan utama yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian di Kecamatan Karang Intan

Berdasarkan analisis, kompetensi penyuluh masih bervariasi, dengan sebagian besar berada pada kategori rendah. Aspek evaluasi dan pelaporan menunjukkan hasil yang baik, namun aspek pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan masih sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif daripada inovasi dan pengembangan diri. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi penyuluh, seperti jumlah penyuluh yang terbatas, pendanaan dan insentif yang belum stabil, serta minimnya sarana dan prasarana kerja. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan infrastruktur ICT di pedesaan juga menjadi tantangan signifikan.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa rekomendasi perbaikan yang disarankan antara lain peningkatan kapasitas berkelanjutan melalui pelatihan rutin, penguatan aspek perencanaan berbasis kebutuhan, pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan, pengembangan sistem insentif berbasis kinerja, revitalisasi kelembagaan penyuluhan, fasilitasi sarana-prasarana yang memadai, dan pendekatan partisipatif serta inovatif.

Kata kunci: Penyuluh Pertanian, Kompetensi Penyuluh, Tugas Pokok.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, karena menyerap lebih dari 40% tenaga kerja, menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, dan menjadi pasar besar bagi produk manufaktur di pedesaan karena jumlah penduduk pedesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan (Luthfi, 2007). Rakyat Indonesia banyak bergantung pada sektor pertanian, mencakup usahatani, ternak dan ikan, buruh tani, hingga agroindustri. Hal ini didukung oleh sumber daya alam yang sesuai, sehingga kegiatan tersebut menjadikan pertanian mempunyai pengertian yang sangat luas (Asep, 2012).

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktifitas tenaga kerja, pembangunan prasarana

ekonomi serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian (Susilowati et al., 2010). Penyuluh pertanian diakui telah banyak memberikan sumbangan keberhasilan pada pembangunan pertanian di Indonesia. Penyuluh telah berhasil menyampaikan berbagai inovasi pertanian kepada petani dengan segala metodenya sehingga para petani meningkat pengetahuan dan keterampilannya serta dapat mengubah sikap petani menjadi mau dan mampu menerapkan inovasi baru (Luthfi, 2007).

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan usaha agar mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, dan kesadaran lingkungan. Penyuluh pertanian berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani, yang dituangkan dalam program penyuluhan (Djasmun, 2000). Tujuan utamanya adalah mengubah perilaku (behavior) petani dan anggota keluarganya yaitu mengubah pengetahuan, sikap, serta keterampilannya. Misi dan peran penyuluh pertanian mencakup (Padmowiharjo, 2001) bertani lebih baik, berusahatani yang lebih menguntungkan, hidup yan lebih sejahtera dan membentuk masyarakat tani yang lebih sejahtera.

Penyuluhan pertanian menuntut penyuluh mendorong perubahan perilaku petani dengan tetap mempertimbangkan etika. Penyuluhan diharapkan mempunyai wawasan yang luas tentang dunia sekelilingnya sehingga dapat menafsirkan rangsangan dan pesan-pesan yang diterima (Ban dan Hawkins, 1999). Penyuluh pertanian harus mampu mendorong petani beralih dari sistem tradisional ke pertanian modern dan komersil. Penyuluh yang berhasil merancang dan melaksanakan program sesuai kondisi petani akan menciptakan petani yang dinamis, progresif, dan usahatani yang maju (Mardikanto, 1999).

Kecamatan Karang Intan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 324,02 km² dan terdiri dari 26 desa. Dengan populasi sekitar 37.155 jiwa pada pertengahan tahun 2024, kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 114,67 jiwa per km². Jumlah penduduk Kecamatan Karang Intan mencapai 37.155 jiwa, dengan komposisi 18.723 laki-laki dan 18.432 perempuan. Rasio jenis kelamin di wilayah ini adalah sekitar 101,58. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sebagian lainnya di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, sektor perdagangan juga mulai berkembang, terutama di desa-desa yang lebih dekat dengan pusat kecamatan dan kota terdekat. Jaringan jalan di Kecamatan Karang Intan cukup baik, dengan jalan utama yang menghubungkan kecamatan ini dengan ibu kota Kabupaten Banjar, Martapura. Fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar tradisional tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Badan Pusat Statistik, 2024).

Karakteristik sosial ekonomi penyuluh dapat mempengaruhi Penyuluh Pertanian Lapangan dalam keberhasilannya melaksanakan tugas (Sudibyo dan Hasanah, 2019). Peran Penyuluh Pertanian Lapangan yang begitu penting dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan untuk membangun

perekonomian rakyat, khususnya di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, mendorong untuk dilakukannya penelitian mengenai hubungan karakteristik sosial ekonomi penyuluh pertanian dengan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan 2) mengetahui permasalahan utama yang dihadapi dalam melaksanakan tugas penyuluh pertanian di Kecamatan Karang Intan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dimulai pada bulan Maret 2025 sampai dengan Oktober 2025, meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan tahapan penyusunan laporan

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner, pedoman wawancara, serta perangkat bantu seperti laptop dan alat tulis. Bahan penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui metode sensus dari 16 responden, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dan dari berbagai dinas atau instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yang mana respondennya adalah seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan dan petugas honorer yang membantu di BPP Kecamatan Karang Intan. Seluruhnya berjumlah 16 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Instrumen: Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner penilaian kompetensi yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

a) mengikuti pendidikan,
b) kegiatan persiapan penyuluhan,
c) pelaksanaan penyuluhan,
d) evaluasi dan pelaporan,
e) pengembangan penyuluhan,
f) pengembangan profesi, dan
g) penunjang penyuluhan.

Untuk mengetahui tujuan pertama yaitu tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di Kecamatan Karang Intan dianalisis dengan menggunakan skoring dan presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$TKPP = \frac{SrD}{SrI} x\ 100\%$$

Dimana:

TKPP : Tingkat Keberhasilan Penyuluh Pertanian

SrD : Skor didapat

SrI : Skor ideal

Untuk mengetahui persentase (%) tingkat keberhasilan penyuluhan pertanian maka dilakukan pengelompokan tingkat keberhasilan penyuluhan pertanian atas tiga kategori:

1. Keberhasilan tinggi jika persentase skor > (median + 0,5. sd)
2. Keberhasilan sedang jika persentase skor (median – 0,5 .sd) ≤ TKPP ≤ (median + 0,5. sd)
3. Keberhasilan rendah jika skor < (median - 0,5 .sd)

Untuk jumlah seluruh skor hasil observasi genap, median berada pada dua angka di tengah. Kedua angka tengah itu dicari dengan rumus; N: 2, dan bilangan median adalah rata-rata dari kedua angka itu (Nurgiyantoro et al., 2002).

Untuk mengetahui tujuan kedua yaitu permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan dilakukan analisis statistika deskriptif dengan membuat kategori dan memperhitungkan frekuensi masing-masing dari masalah yang berhasil diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil Penelitian

Distribusi Umum Tingkat PelaksanaanTugas Pokok

Hasil analisis terhadap distribusi tingkat kompetensi penyuluh pertanian menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar responden. Hal ini dapat dilihat ada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Distribusi Skor Pelaktasaan Tugas Penyuluhan Pertanian

Kategori	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Tinggi	>85	2	12,50 %
Sedang	83–85	6	37,50 %
Rendah	<83	8	50,00 %
Jumlah	-	16	100 %

Dari total 16 orang penyuluh yang menjadi sampel, sebanyak 8 orang (50%) berada pada kategori rendah (<83). Hal ini mengindikasikan bahwa separuh dari penyuluh belum memenuhi standar kompetensi yang ideal untuk melaksanakan tugas pokok penyuluhan secara optimal. Sementara itu, 6 orang (37,5%) berada pada kategori sedang (83–85) dan hanya 2 orang (12,5%) yang termasuk kategori tinggi (>85).

Dominasi kategori rendah ini memperlihatkan bahwa secara umum kapasitas penyuluh masih belum merata. Rendahnya capaian kompetensi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan berkelanjutan, kurangnya motivasi untuk mengembangkan diri, minimnya dukungan fasilitas, maupun keterikatan pada pola kerja yang masih konvensional. Kondisi ini sejalan dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa keberhasilan penyuluh sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan pengalaman kerja, serta ketersediaan sarana penunjang (Sulaiman et al., 2020).

Dengan demikian, hasil distribusi umum ini memberi gambaran bahwa masih terdapat kesenjangan kompetensi yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan program peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.

Distribusi Kompetensi per Komponen Aspek Tugas Penyuluhan

Jika ditinjau lebih spesifik berdasarkan aspek tugas penyuluhan, terlihat adanya perbedaan yang cukup tajam antarunsur kompetensi:

Mengikuti Pendidikan. Seluruh responden (100%) masuk kategori rendah. Artinya, para penyuluh kurang terlibat dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Padahal, partisipasi aktif dalam pendidikan berkelanjutan menjadi salah satu indikator utama profesionalisme penyuluh. Rendahnya kompetensi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan program pelatihan yang tersedia, atau adanya hambatan waktu dan biaya.

Kegiatan Persiapan Penyuluhan. Pada aspek ini, 56,25% responden berada pada kategori rendah dan 43,75% pada kategori sedang. Tidak ada yang mencapai kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa penyuluh masih mengalami kesulitan dalam merencanakan kegiatan penyuluhan secara sistematis, baik dari segi penyusunan materi, pemetaan kebutuhan petani, maupun penggunaan metode yang sesuai.

Pelaksanaan Penyuluhan. Distribusi kompetensi lebih bervariasi: 18,75% rendah, 62,5% sedang, dan 18,75% tinggi. Mayoritas penyuluh (62,5%) sudah berada pada tingkat sedang, yang menunjukkan adanya kemampuan moderat dalam menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi, serta menggunakan metode penyuluhan. Namun, rendahnya persentase kategori tinggi (hanya 18,75%) memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Evaluasi dan Pelaporan. Menariknya, pada aspek ini seluruh responden (100%) masuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh relatif lebih mampu dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan dan menyusun laporan administratif. Kemungkinan besar hal ini didukung oleh adanya format laporan yang baku dari instansi, sehingga penyuluh terbiasa mengisi dan menyusun laporan sesuai pedoman.

Pengembangan Penyuluhan. Seluruh responden (100%) masuk kategori rendah. Hal ini menggambarkan lemahnya kemampuan penyuluh dalam mengembangkan model, inovasi, atau metode

penyuluhan baru. Keterbatasan dalam aspek ini dapat menyebabkan stagnasi penyuluhan yang hanya berulang pada pola lama, tanpa adanya pembaruan sesuai dinamika kebutuhan petani.

Pengembangan Profesi. Sama halnya dengan aspek sebelumnya, 100% responden berada pada kategori rendah. Rendahnya kompetensi dalam pengembangan profesi menandakan minimnya upaya penyuluh untuk meningkatkan jenjang karier, memperluas jejaring profesional, ataupun mengakses forum ilmiah.

Penunjang Penyuluhan. Seluruh responden (100%) kembali masuk kategori rendah. Aspek ini meliputi penguasaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi massa, serta pemanfaatan media penunjang. Rendahnya kompetensi ini sangat krusial karena di era digital, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi merupakan syarat penting agar penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Pembahasan

Dari keseluruhan data, terlihat pola yang kontras: aspek administratif seperti evaluasi dan pelaporan relatif dikuasai dengan baik, sedangkan aspek strategis seperti pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan justru sangat lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluh cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi kurang pada inovasi, pembaruan metode, dan pemanfaatan teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kompetensi penyuluh pertanian masih berada pada kategori rendah. Hal ini tampak dari 50% responden berada pada kategori rendah, sementara hanya 12,5% yang mencapai kategori tinggi.

Jika dianalisis berdasarkan aspek, terdapat perbedaan signifikan antar bidang kompetensi. Evaluasi dan pelaporan menjadi aspek yang paling kuat, dengan seluruh responden masuk kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan administratif penyuluh dalam membuat laporan dan melakukan evaluasi sudah baik.

Sebaliknya, aspek pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan masih sepenuhnya rendah (100%). Kondisi ini menunjukkan kurangnya upaya dalam pengembangan diri maupun inovasi penyuluhan. Aspek pelaksanaan penyuluhan relatif lebih baik karena terdapat responden yang masuk kategori sedang (62,5%) bahkan tinggi (18,75%), meskipun masih perlu peningkatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh seringkali lebih kuat pada aspek administratif, namun lemah pada aspek inovasi dan pengembangan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan dan pengembangan profesi sangat dibutuhkan.

Implikasinya, meskipun kegiatan penyuluhan tetap berjalan, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas petani dan mempercepat transfer teknologi menjadi terbatas. Hal ini menguatkan pandangan bahwa penyuluh perlu difasilitasi dengan program peningkatan kapasitas yang

lebih menekankan pada aspek inovasi, pengembangan diri, serta pemanfaatan teknologi digital agar perannya lebih relevan dengan tantangan pertanian modern.

Permasalahan Utama yang Dihadapi dalam Melaksanakan Tugas Penyuluh Pertanian

Penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian yang berfungsi sebagai sarana alih teknologi dan inovasi kepada petani. Kompetensi penyuluh sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pokok penyuluhan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh seringkali tidak merata, terutama pada aspek pengembangan profesi dan inovasi (Sutarto, 2020; Rahmawati, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penyuluh pertanian dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan. Data diperoleh dari 16 responden penyuluh pertanian dengan pengukuran pada aspek pendidikan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas penyuluh berada pada kategori rendah (50%), sedangkan hanya 12,5% yang mencapai kategori tinggi. Aspek evaluasi dan pelaporan tergolong sangat baik, tetapi aspek pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan sepenuhnya berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan adanya sejumlah permasalahan mendasar yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian.

Sumber Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi kompetensi penyuluh pertanian menunjukkan kondisi yang masih jauh dari ideal. Dari total responden, sebanyak 50% berada pada kategori rendah, 37,5% pada kategori sedang, dan hanya 12,5% yang mampu mencapai kategori tinggi. Distribusi ini menggambarkan bahwa sebagian besar penyuluh masih menghadapi keterbatasan dalam menguasai keterampilan inti yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyuluhan. Analisis lebih lanjut pada masing-masing aspek memperlihatkan adanya variasi kinerja yang cukup signifikan.

Pertama, pada aspek Mengikuti Pendidikan, seluruh responden berada pada kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan minimnya partisipasi penyuluh dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal, baik berupa pelatihan teknis, workshop, maupun program peningkatan kapasitas lainnya. Rendahnya keterlibatan dalam kegiatan pendidikan berimplikasi pada terbatasnya pengetahuan baru yang dimiliki penyuluh, sehingga kemampuan mereka dalam merespons perkembangan teknologi, dinamika pasar, maupun kebijakan pertanian menjadi kurang optimal. Hal ini juga mengindikasikan adanya hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya dukungan kelembagaan, maupun motivasi personal yang rendah untuk mengembangkan diri.

Kedua, aspek Persiapan Penyuluhan memperlihatkan kecenderungan masih rendah, dengan 56,25% penyuluh berada pada kategori rendah dan 43,75% pada kategori sedang. Kondisi ini menegaskan kelemahan dalam tahap perencanaan kegiatan penyuluhan. Persiapan yang kurang matang

biasanya berdampak pada kualitas pelaksanaan, misalnya materi yang disampaikan tidak sesuai kebutuhan petani, kurangnya media penyuluhan yang menarik, atau metode yang digunakan tidak efektif. Padahal, perencanaan yang baik merupakan kunci untuk memastikan pesan penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh sasaran.

Ketiga, pada aspek Pelaksanaan Penyuluhan, capaian penyuluh relatif lebih baik dibanding aspek sebelumnya. Sebanyak 62,5% berada pada kategori sedang dan 18,75% sudah masuk kategori tinggi, meskipun masih terdapat sebagian responden yang masuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktis, penyuluh memiliki kemampuan dasar dalam menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Namun demikian, belum optimalnya proporsi kategori tinggi mengindikasikan perlunya peningkatan keterampilan komunikasi, penggunaan metode partisipatif, serta pemanfaatan media berbasis teknologi informasi yang lebih modern agar penyuluhan menjadi lebih efektif dan menarik.

Keempat, aspek **Evaluasi dan Pelaporan** justru menjadi **kekuatan utama**, di mana seluruh responden berada pada kategori tinggi. Kondisi ini cukup menarik, karena menunjukkan bahwa penyuluh sudah memiliki keterampilan administratif yang baik, terutama dalam mendokumentasikan kegiatan dan membuat laporan. Hal ini dapat dipahami karena kegiatan evaluasi dan pelaporan merupakan kewajiban formal yang seringkali menjadi indikator kinerja yang terukur oleh lembaga penyuluhan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan pada aspek administratif ini tidak serta merta mencerminkan keberhasilan substantif dalam penyuluhan, sebab kualitas dampak di lapangan lebih ditentukan oleh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan.

Kelima, aspek Pengembangan Penyuluhan, Pengembangan Profesi, dan Penunjang Penyuluhan menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena 100% responden berada pada kategori rendah. Ini berarti penyuluh sangat minim dalam melakukan inovasi, pengembangan metode, maupun penguatan kapasitas profesional yang berkelanjutan. Kelemahan ini menjadi titik paling kritis dalam keseluruhan kompetensi penyuluh. Tanpa adanya upaya pengembangan yang berkelanjutan, penyuluh akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan lingkungan pertanian yang semakin kompleks, seperti tantangan perubahan iklim, digitalisasi pertanian, dan dinamika pasar global.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan adanya ketimpangan kompetensi penyuluh antara aspek administratif (evaluasi dan pelaporan) yang sudah relatif baik, dengan aspek substantif (pengembangan penyuluhan dan profesi) yang masih sangat lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan pengembangan penyuluh selama ini lebih menekankan pada kepatuhan administratif daripada peningkatan kapasitas substantif yang berorientasi pada inovasi dan dampak langsung ke petani.

Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kompetensi penyuluh, khususnya pada aspek pendidikan berkelanjutan, persiapan yang berbasis kebutuhan, pelaksanaan yang inovatif, serta pengembangan profesionalisme. Tanpa perbaikan menyeluruh,

penyuluhan pertanian berpotensi kehilangan peran strategisnya sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Implikasi Praktis dari Sumber Permasalahan Tersebut

Dengan adanya sumber-sumber permasalahan tersebut, implikasi yang kemudian muncul dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian adalah meliputi hal-hal berikut.

Terhambatnya transfer teknologi ke petani. Dengan rendahnya kompetensi penyuluh dalam aspek pendidikan, pengembangan profesi, dan pengembangan penyuluhan, maka kemampuan penyuluh untuk memperkenalkan inovasi pertanian modern kepada petani menjadi terbatas. Akibatnya, petani cenderung bertahan dengan praktik lama yang kurang produktif dan tidak ramah lingkungan.

Kualitas perencanaan yang lemah berpengaruh pada efektivitas kegiatan. Persiapan penyuluhan yang rendah menyebabkan materi dan metode yang disampaikan serin gkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik petani. Hal ini dapat menurunkan minat dan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan lebih administratif daripada substantif. Tingginya capaian pada aspek evaluasi dan pelaporan menunjukkan bahwa penyuluh lebih terbiasa dengan pekerjaan administratif. Namun, dominasi aspek administratif ini justru dapat mengurangi fokus terhadap substansi penyuluhan yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh petani.

Kurangnya inovasi dalam metode penyuluhan. Dengan semua responden berada pada kategori rendah dalam aspek pengembangan penyuluhan dan profesi, kegiatan penyuluhan berisiko stagnan. Hal ini berdampak pada rendahnya relevansi penyuluhan di tengah perkembangan teknologi pertanian dan transformasi digital.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi lapangan**.** Temuan ini juga mencerminkan bahwa kebijakan peningkatan kapasitas penyuluh belum berjalan optimal. Ada kemungkinan bahwa program pelatihan, pembinaan, dan insentif yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan penyuluh di lapangan.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan-temuan dari rangkaian kegiatan penelitian ini, meliputi kompetensi penyuluh, pelaksanaan tugas pokok mereka dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian maka perbaikan-perbaikan yang dirasakan perlu dapat direkomendasikan sebagai berikut.

Peningkatan kapasitas berkelanjutan (Continuous Professional Development).

Pemerintah daerah dan lembaga penyuluhan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin, kursus singkat, dan workshop tematik berbasis kebutuhan lokal. Fokus harus diberikan pada teknologi pertanian terbaru, strategi komunikasi efektif, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penguatan aspek perencanaan berbasis kebutuhan (Need-Based Planning).

Penyuluh perlu dibekali dengan keterampilan analisis kebutuhan petani (need assessment) agar persiapan kegiatan penyuluhan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, materi yang diberikan benar-benar relevan dengan kondisi lapangan.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan.

Untuk mengatasi keterbatasan sarana-prasarana, penyuluh perlu didorong menggunakan media digital seperti aplikasi mobile, video pembelajaran, grup WhatsApp, atau platform e-learning sebagai sarana pendukung penyuluhan. Transformasi digital juga dapat memperluas jangkauan penyuluhan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu.

Pengembangan sistem insentif berbasis kinerja.

Agar penyuluh termotivasi meningkatkan kompetensinya, sistem penghargaan dan insentif perlu diberikan tidak hanya pada laporan administratif, tetapi juga pada inovasi lapangan, keberhasilan adopsi teknologi oleh petani, serta kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

Revitalisasi kelembagaan penyuluhan.

Perlu adanya penguatan koordinasi antara penyuluh, dinas pertanian, lembaga riset, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini akan membantu memperkaya pengetahuan penyuluh sekaligus menyediakan akses terhadap inovasi terbaru.

Fasilitasi sarana-prasarana penyuluhan yang memadai.

Pemerintah perlu menyediakan transportasi dinas, alat peraga modern, dan akses internet di wilayah pedesaan agar penyuluh dapat bekerja lebih efektif. Dukungan logistik ini merupakan prasyarat penting untuk menunjang pelaksanaan penyuluhan.

Pendekatan partisipatif dan inovatif.

Penyuluh perlu dilatih untuk menggunakan metode partisipatif seperti Sekolah Lapang, Farmer Field School (FFS), dan demonstrasi plot. Dengan cara ini, penyuluhan menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh petani.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penyuluhan pertanian di Kecamatan Karang Intan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas petani dan mempercepat transfer teknologi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan. Berdasarkan analisis, kompetensi penyuluh masih bervariasi, dengan sebagian besar berada pada kategori rendah. Aspek evaluasi dan pelaporan menunjukkan hasil yang baik, namun aspek pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan masih sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif daripada inovasi dan pengembangan diri.

Saran

Peningkatan kapasitas berkelanjutan, Pemerintah daerah dan lembaga penyuluhan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin, kursus singkat, dan workshop tematik berbasis kebutuhan lokal. Fokus harus diberikan pada teknologi pertanian terbaru, strategi komunikasi efektif, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penguatan aspek perencanaan berbasis kebutuhan**,** penyuluh perlu dibekali dengan keterampilan analisis kebutuhan petani agar persiapan kegiatan penyuluhan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, materi yang diberikan benar-benar relevan dengan kondisi lapangan.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan, penyuluh perlu didorong menggunakan media digital seperti aplikasi mobile, video pembelajaran, grup WhatsApp, atau platform e-learning sebagai sarana pendukung penyuluhan. Transformasi digital juga dapat memperluas jangkauan penyuluhan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu.

Pengembangan sistem insentif berbasis kinerja, agar penyuluh termotivasi meningkatkan kompetensinya, sistem penghargaan dan insentif perlu diberikan tidak hanya pada laporan administratif, tetapi juga pada inovasi lapangan, keberhasilan adopsi teknologi oleh petani, serta kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

Revitalisasi kelembagaan penyuluhan, perlu adanya penguatan koordinasi antara penyuluh, dinas pertanian, lembaga riset, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini akan membantu memperkaya pengetahuan penyuluh sekaligus menyediakan akses terhadap inovasi terbaru.

Fasilitasi sarana-prasarana penyuluhan yang memadai, Pemerintah perlu menyediakan transportasi dinas, alat peraga modern, dan akses internet di wilayah pedesaan agar penyuluh dapat bekerja lebih efektif. Dukungan logistik ini merupakan prasyarat penting untuk menunjang pelaksanaan penyuluhan.

Pendekatan partisipatif dan inovatif**,** penyuluh perlu dilatih untuk menggunakan metode partisipatif seperti Sekolah Lapang, Farmer Field School (FFS), dan demonstrasi plot. Dengan cara ini, penyuluhan menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan dan petugas honorer yang membantu di BPP Kecamatan Karang Intan dan para mahasiswa yang membantu pelaksanaan riset ini baik sebagai enumerator, pengolah data maupun sebagai asisten penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Th 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Badan Pusat Statistik. 2024. Kecamatan Karang Intan Dalam Angka. BPS Kabupaten Banjar. Banjar, Volume 35.

Darmansyah, Asep. 2012. Akuntansi Agribisnis. Alfabeta. Bandung.

Djasmun. 2000. Program dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian, untuk Mahasiswa/MahasiswiSemester V. Akademi Penyuluhan Pertanian (APP). Medan.

Fatah, Luthfi. 2007. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pustaka Banua. Banjarmasin.

Mardikanto, T. 1999. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nurgiyantoro, et al. 2002. Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Padmowiharjo, S. 2001. Metode Penyuluhan Pertanian. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Sudibyo, R. P., A. Bakhtiar & M. A. Hasanah. 2019. Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Penyuluh dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh Pertanian di Kota Batu. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 3(4), 710-719.

Susilowati, et al. 2010. Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi. Pusat Analisis sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.